Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page:352 - 359

Evaluasi Implementasi dan Realisasi Anggaran Belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo

Yuliana Panggalo[1*], Kristian Hoegh Pride Lambe[2], Agustinus Ba'ka[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
panggaloyuli20@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi dan realisasi anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran rata-rata mencapai 85–92% dari pagu, namun belum optimal karena masih terdapat perbedaan signifikan antara rencana dan pelaksanaan. Kendala utama meliputi keterlambatan proses pengadaan, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarbagian yang kurang efektif, serta tantangan geografis dan infrastruktur. Meskipun telah dilakukan upaya perbaikan seperti pelatihan dan monitoring, realisasi anggaran masih terfokus di triwulan akhir. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem informasi keuangan, serta peningkatan mekanisme pengawasan berbasis outcome untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Temuan ini berimplikasi pada perlunya reformasi tata kelola anggaran daerah, khususnya di wilayah terpencil, guna meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: evaluasi anggaran, realisasi belanja, pengelolaan keuangan daerah, efektivitas, Yahukimo.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation and realization of the expenditure budget at the Regional Secretariat of Yahukimo Regency and to analyze the factors affecting its effectiveness and efficiency. Employing a descriptive qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and observation. The findings reveal that the budget realization averaged 85–92% of the allocated funds but did not fully meet the planned targets. Key obstacles include delays in procurement processes, limited human resource capacity, ineffective interdepartmental coordination, and geographical as well as infrastructural challenges. Although efforts such as training and periodic monitoring have been undertaken, budget absorption remains concentrated in the final quarter of the fiscal year. The study underscores the need to strengthen human resource capacity, optimize the use of financial information systems, and enhance outcome-based monitoring mechanisms to promote efficiency and accountability. These findings highlight the urgency of reforming local budget governance, particularly in remote regions, to improve transparency and the quality of public service delivery.

Keywords: *budget evaluation, expenditure realization, local financial management, effectiveness, Yahukimo.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen alokasi sumber daya, tetapi juga mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Halim & Kusufi, 2020). Dalam praktiknya, efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran masih menjadi tantangan utama di banyak daerah di Indonesia, termasuk wilayah Papua Pegunungan.

Di Kabupaten Yahukimo, realisasi belanja pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir belum sepenuhnya optimal, dengan rata-rata realisasi belanja berkisar 85–92% dari total pagu anggaran. Kondisi ini diperburuk oleh keterlambatan pengadaan barang/jasa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kendala geografis dan infrastruktur yang khas daerah pegunungan (BPK RI, 2022). Fenomena serupa juga ditemukan pada banyak pemerintah daerah lain di Indonesia, di mana penyerapan anggaran cenderung menumpuk pada triwulan IV, sehingga mengurangi efektivitas program pembangunan (Kurniawan & Nugroho, 2019; World Bank, 2021).

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Yahukimo (2020–2022)

Tahun	Pagu Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Persentase Realisasi (%)
2020	1.250,00	1.075,00	86,0
2021	1.320,00	1.150,00	87,1
2022	1.400,00	1.285,00	91,8

Sumber: Data olahan dari Laporan Keuangan Pemda Yahukimo, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun persentase realisasi anggaran cukup tinggi, namun masih terdapat selisih signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam proses perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan anggaran.

Penelitian mengenai efektivitas realisasi anggaran daerah menjadi sangat penting, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Yahukimo. Optimalisasi realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan serta pelayanan publik (Siregar, 2021; OECD, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan anggaran, sekaligus kontribusi teoretis dalam literatur akuntabilitas keuangan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat realisasi anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran di Kabupaten Yahukimo?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran?

TINJAUAN LITERATUR

Anggaran Sektor Publik dan Pendekatan Berbasis Kinerja

Dalam akuntansi sektor publik, anggaran dipahami sebagai rencana keuangan tahunan yang memadukan tujuan program dengan alokasi sumber daya (Mardiasmo, 2009). Pendekatan tradisional (line-item) menitikberatkan pada input, sedangkan anggaran berbasis kinerja menautkan pendanaan dengan output dan outcome untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana publik (Jones & Pendlebury, 2000). Kerangka ini menegaskan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam seluruh siklus anggaran, mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban (Mahmudi, 2016).

Kerangka Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berlandaskan UU 17/2003, UU 23/2014, PP 12/2019, serta Permendagri 77/2020 yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Regulasi-regulasi ini mengatur tahapan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan (internal dan eksternal) agar tata kelola keuangan daerah lebih andal.

Standar Pelaporan: Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02)

Penerapan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi pilar akuntabilitas pelaksanaan APBD. Studi terbaru menunjukkan implementasi standar ini di sejumlah perangkat daerah masih menghadapi hambatan—mulai dari ketepatan klasifikasi hingga ketaatan pada format—yang berpotensi menurunkan kualitas laporan dan mengaburkan evaluasi kinerja serapan anggaran (Rindengan & Kapojos, 2024).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi dan Implementasi Anggaran

Literatur empiris menegaskan bahwa realisasi anggaran dipengaruhi kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara **internal**, kapasitas SDM, disiplin administrasi, kesiapan dokumen, mutu perencanaan, serta koordinasi antarbagian berkontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan (Angelia, 2022; Novianti, 2021). **Eksternal**nya, perubahan regulasi, dinamika kebijakan (mis. penyesuaian SIPD, refocusing), dan kondisi geografis turut memengaruhi deviasi rencana–realisasi (Lubi & Kesumawati, 2024; Novitasari, 2024). Bukti lapangan yang dihimpun dalam penelitian ini mengafirmasi temuan-temuan tersebut: keterlambatan proses pengadaan, kapasitas teknis SDM yang belum merata, serta koordinasi internal yang lemah kerap menunda serapan hingga menumpuk pada triwulan akhir (Lambe et al., 2025; Sanggenafa et al., 2025; Sombo et al., 2025).

Selain itu, wawancara para informan kunci di lingkungan Sekretariat Daerah menyoroti peran krusial sistem informasi (SIPD), kualitas dokumen (SPD, SPM, SP2D), dan pengawasan Inspektorat; kendala teknis aplikasi serta keterlambatan dokumen sering menjadi sumber bottleneck realisasi (testimoni Sekda, Kabag/ Kasubbag Keuangan, Bendahara, Inspektorat, dan DPRK).

Konteks Wilayah Tertinggal/3T dan Papua Pegunungan

Studi-studi di Papua—termasuk Yahukimo—menunjukkan bahwa tantangan geografis (akses logistik, kondisi alam) dan infrastruktur memengaruhi biaya serta ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga berdampak pada efektivitas serapan anggaran dan risiko deviasi output (Jikwa, 2023; Kobak & Rumbiak, 2023). Tesis ini menambahkan bukti kontekstual: medan yang menantang dan distribusi barang/jasa yang tidak lancar berkontribusi pada rendahnya penyerapan awal tahun dan akumulasi di akhir tahun anggaran.

Pengawasan, Akuntabilitas, dan Kualitas Laporan

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) dan audit BPK menjadi mekanisme kunci untuk menekan risiko inefisiensi, ketidaksesuaian, dan keterlambatan pelaksanaan(Iyai et al., 2025; Mangallo et al., 2025; Paembonan et al., 2024). Namun, temuan di literatur dan data lapangan menunjukkan perlunya penguatan tindak lanjut hasil pengawasan serta pergeseran orientasi dari sekadar kepatuhan administratif menuju evaluasi berbasis outcome agar nilai manfaat anggaran terukur (Novianti, 2021; bukti wawancara Inspektorat/DPRK).

Research Gap

Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada daerah yang relatif mudah dijangkau, sementara konteks daerah terpencil seperti Yahukimo masih terbatas dikaji. Kesenjangan literatur terletak pada integrasi temuan kualitatif berlapis—mencakup dinamika pengadaan, kapasitas SDM, koordinasi lintas-bagian, dan hambatan geografis—dengan evaluasi berbasis indikator kinerja (output–outcome) pada level Sekretariat Daerah. Tesis ini mengisi celah tersebut dengan menyajikan bukti triangulatif dari dokumen, wawancara multi-aktor, dan kerangka regulatif terkini (PP 12/2019; Permendagri 77/2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait implementasi dan realisasi anggaran belanja di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual, holistik, dan mendalam melalui interaksi langsung dengan informan serta analisis dokumen resmi (Creswell & Poth, 2018). Metode kualitatif dinilai tepat dalam mengevaluasi dinamika pengelolaan keuangan publik, khususnya pada konteks daerah dengan kompleksitas geografis dan administratif yang tinggi.

Populasi penelitian adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo. Dari populasi tersebut, dipilih tujuh informan kunci melalui purposive sampling, yakni Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Bagian Perencanaan, Inspektur Daerah, serta Anggota DPRK. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan langsung dalam proses implementasi serta evaluasi anggaran. Teknik purposive sampling dipandang sesuai untuk penelitian kualitatif karena memberikan kesempatan memperoleh informasi yang kaya dan relevan dari partisipan yang benar-benar memahami masalah penelitian (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dengan fokus pada realisasi anggaran tahun 2024. Pemilihan lokasi dilakukan karena Sekretariat Daerah merupakan unit strategis yang berperan sebagai koordinator administrasi dan pusat pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, mencakup proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam dengan informan kunci untuk memperoleh gambaran mengenai kendala dan strategi implementasi anggaran. Kedua, dokumentasi yang meliputi analisis dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Ketiga, observasi lapangan guna memahami praktik administrasi dan dinamika pengelolaan keuangan secara langsung. Kombinasi tiga teknik ini bertujuan menjaga validitas dan reliabilitas data melalui triangulasi sumber (Denzin, 2017).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses reduksi dilakukan dengan memilah data yang relevan, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi dan tabel agar memudahkan interpretasi, serta menarik kesimpulan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir. Analisis ini memungkinkan identifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian terdiri dari tujuh informan kunci yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo. Karakteristik responden ditampilkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Lama Pengalaman	Peran Utama dalam Anggaran
1	Redison Manurung, S.Pd., M.Si	Sekretaris Daerah	>20 tahun	Koordinasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran
2	Viktor Kasse, SE., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan	>15 tahun	Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran
3	Paisal, SE., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan	±12 tahun	Administrasi keuangan dan penyusunan LRA
4	Aeja Boerdam, SE	Bendahara Pengeluaran	±10 tahun	Pencairan dan pencatatan transaksi anggaran
5	Sandi Londong P, A.Md.Kep	Staf Bagian Perencanaan	±5 tahun	Penyusunan dokumen RKA dan DPA
6	Charles P. Situmorang, SE., M.Si., CFrA	Inspektur Daerah	>18 tahun	Pengawasan internal dan audit kepatuhan
7	Nelson Bahabol, S.Dos., M.Si	Anggota DPRK	>10 tahun	Fungsi legislasi dan pengawasan APBD

Sumber: Data primer penelitian (2025)

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan para informan kunci memperlihatkan berbagai kendala, capaian, dan rekomendasi terkait implementasi anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo. Ringkasan dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara dengan Informan Kunci

Tema Penelitian	Ringkasan Temuan Lapangan
Realisasi Anggaran	Rata-rata realisasi belanja mencapai 85–92% dari pagu, namun penyerapan masih

Tema Penelitian	Ringkasan Temuan Lapangan
	menumpuk di triwulan IV. Beberapa kegiatan tidak terlaksana tepat waktu karena keterlambatan administrasi dan faktor geografis.
Faktor Internal	Kapasitas SDM yang terbatas dalam penguasaan aplikasi keuangan, keterlambatan dokumen pencairan, serta koordinasi antarbagian yang belum optimal.
Faktor Eksternal	Kondisi geografis dan cuaca ekstrem, keterbatasan infrastruktur, serta perubahan regulasi pusat (misalnya SIPD dan refocusing anggaran).
Efektivitas	Program yang berjalan sebagian besar sesuai prioritas Renja dan RKPD, namun efektivitas outcome belum terukur secara optimal karena indikator masih berfokus pada serapan anggaran.
Efisiensi	Upaya efisiensi dilakukan, tetapi biaya logistik tinggi akibat kondisi wilayah terpencil membuat pengeluaran relatif besar.
Pengawasan	Inspektorat melakukan monitoring rutin, tetapi lebih menekankan aspek administratif daripada evaluasi manfaat program. DPRK turut melakukan fungsi pengawasan, meski perlu diperkuat dalam tindak lanjut rekomendasi.

Sumber: Data primer hasil wawancara (2024)

Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, tingkat realisasi anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo tergolong tinggi (85–92%), namun belum optimal karena masih terdapat deviasi signifikan antara rencana dan pelaksanaan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi aspek internal (SDM, dokumen, koordinasi) dan eksternal (kondisi geografis, infrastruktur, regulasi). Ketiga, efektivitas penggunaan anggaran cukup baik pada kegiatan rutin, tetapi efisiensi relatif rendah akibat biaya distribusi tinggi dan lemahnya sistem pengawasan berbasis outcome.

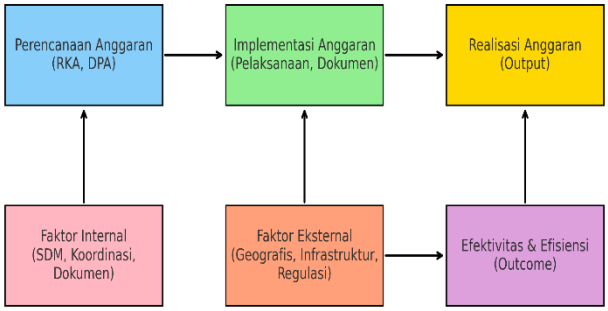
Pembahasan

Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa rendahnya kualitas perencanaan dan kapasitas SDM menjadi faktor penghambat utama realisasi anggaran di daerah (Angelia, 2022; Novitasari, 2024). Penumpukan serapan anggaran di akhir tahun sebagaimana terjadi di Yahukimo juga ditemukan pada daerah lain, yang menunjukkan lemahnya sinkronisasi perencanaan dan pengadaan (Kurniawan & Nugroho, 2019; World Bank, 2021).

Selain itu, konteks geografis Yahukimo memperlihatkan bahwa tantangan infrastruktur dan cuaca ekstrem secara signifikan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hal ini memperkuat argumen bahwa studi anggaran di wilayah terpencil membutuhkan perhatian khusus karena kendalanya berbeda dengan daerah perkotaan (Jikwa, 2023). Dari sisi pengawasan, penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Inspektorat dan DPRK masih dominan pada aspek kepatuhan administratif, belum sepenuhnya mengarah pada pengukuran outcome program. Kondisi ini menguatkan temuan Novianti (2021) bahwa pengawasan berbasis dokumen cenderung kurang mendorong akuntabilitas substantif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola anggaran melalui penguatan kapasitas SDM, percepatan digitalisasi administrasi keuangan, peningkatan koordinasi lintas bagian, serta transformasi sistem pengawasan dari sekadar kepatuhan administratif menuju evaluasi berbasis manfaat program.

Penulis menggambarkan model konseptual berdasarkan hasil penelitian ini seperti pada gambar berikut.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 1. Model Konseptual

Model konseptual ini menjelaskan hubungan antara tahapan pengelolaan anggaran

dengan faktor-faktor yang memengaruhinya serta hasil (outcome) yang diharapkan.

1. **Perencanaan Anggaran (RKA, DPA)** menjadi titik awal penyusunan program dan kegiatan.
2. **Implementasi Anggaran** dipengaruhi oleh faktor internal (kapasitas SDM, koordinasi, kelengkapan dokumen) dan faktor eksternal (geografis, infrastruktur, regulasi).
3. **Realisasi Anggaran** mencerminkan tingkat pencapaian output, yang seringkali belum optimal akibat keterlambatan pengadaan dan hambatan geografis.
4. Pada tahap akhir, **Efektivitas dan Efisiensi** mengukur outcome berupa ketercapaian tujuan program, penggunaan sumber daya, serta kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, framework ini menegaskan bahwa pencapaian efektivitas dan efisiensi anggaran tidak hanya bergantung pada realisasi belanja, tetapi juga pada kualitas perencanaan, kapasitas implementasi, serta mekanisme pengawasan yang adaptif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi implementasi dan realisasi anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah mencapai tingkat yang relatif tinggi, yaitu 85–92% dari pagu, namun pencapaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas pelaksanaan program karena masih terdapat deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi anggaran ditemukan berasal dari aspek internal dan eksternal. Aspek internal mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelengkapan dokumen, dan lemahnya koordinasi antarbagian. Sementara itu, aspek eksternal meliputi kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika regulasi nasional yang sering berubah. Hambatan-hambatan ini berkontribusi terhadap keterlambatan pelaksanaan dan penumpukan realisasi anggaran pada triwulan akhir.

Efektivitas penggunaan anggaran dinilai cukup baik karena sebagian besar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai prioritas pembangunan daerah. Namun, efisiensi anggaran masih menghadapi tantangan, terutama terkait tingginya biaya logistik dan distribusi akibat kondisi geografis Yahukimo. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang tinggi belum otomatis mencerminkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, percepatan digitalisasi administrasi keuangan, serta penguatan koordinasi lintas bagian untuk meningkatkan efektivitas implementasi anggaran. Selain itu, mekanisme pengawasan perlu bertransformasi dari sekadar kepatuhan administratif menuju evaluasi berbasis outcome agar kualitas belanja daerah lebih terukur. Secara teoretis, temuan ini memperkaya literatur mengenai manajemen keuangan publik dengan menekankan konteks geografis dan administratif daerah terpencil yang sering terabaikan dalam studi sebelumnya.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi tata kelola anggaran di daerah tertinggal seperti Yahukimo melalui integrasi antara perencanaan yang lebih realistis, implementasi yang didukung SDM kompeten, serta pengawasan berbasis manfaat program. Upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di wilayah yang memiliki kompleksitas tantangan pembangunan.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas pada pejabat struktural dan pengawas anggaran, sehingga perspektif masyarakat penerima manfaat belum terakomodasi. Selain itu, penelitian hanya berfokus pada satu tahun anggaran sehingga tidak sepenuhnya menangkap tren jangka panjang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) dengan cakupan waktu lebih panjang serta melibatkan aktor non-pemerintah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Angelia, A. (2022). Implementasi sistem kinerja anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 14*(2), 101–112.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (4th ed.). Routledge.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5*(1), 1–4. https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (5th ed.). Salemba Empat.

Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 32–42. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872

Jikwa, Y. (2023). Evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14*(1), 55–66.

Jones, L. R., & Pendlebury, M. (2000). *Public sector accounting* (6th ed.). Pearson Education.

Kurniawan, T., & Nugroho, A. (2019). Analisis penyerapan anggaran pemerintah daerah: Faktor penyebab dan solusi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 19*(2), 145–160. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i2.1120

Lambe, K., Patiung, N., & Latiep, I. F. (2025). THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN STRENGTHENING THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, *7*(1), 60–71. https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/286/168

Lubi, B., & Kesumawati, N. (2024). Monitoring realisasi keuangan dan fisik pada Pemerintah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Publik, 16*(1), 45–57.

Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 108–115. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). Andi.

Novitasari, N. (2024). Analisis realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Semarang. *Jurnal Riset Akuntansi Daerah, 12*(1), 88–99.

Novianti, E. (2021). Sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Audit Publik, 17*(2), 134–145. https://doi.org/10.24821/jaap.v17i2.246

OECD. (2022). *Public financial management in OECD countries*. OECD Publishing.

Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, *2*(2), 1–6. https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254

Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 50–58. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308

Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 108–119. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738

Rindengan, A. M. T., & Kapojos, P. M. (2024). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 8*(1), 33–44.

Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota : Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 22–28. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300

Siregar, M. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD: Studi empiris di pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12*(2), 77–89.

Sombo, S., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kualitatif di DPMPTSP Kabupaten Dogiyai). *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(2), 61–69. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/990

World Bank. (2021). *Indonesia public expenditure review 2021: Spending for better results*. World Bank Group.

/